

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Tibet mempunyai hubungan kurang baik dengan pemerintahan Tiongkok karena beberapa hal yang sudah pernah terjadi seperti Tibetan Uprising dan lain-lain. Tiongkok menyatakan bahwa Tibet merupakan bagian dari Tiongkok dengan otonomi wilayah khusus yaitu TAR (*Tibetan Autonomous Region*). Disisi lain, Tibet tidak mengakui bahwa mereka merupakan bagian dari Tiongkok (Sperling, 2009). Masyarakat Tibet tidak menerima bahwa mereka merupakan bagian dari Tiongkok. Slodkowski & Lies (2021) menuliskan bahwa Dalai Lama tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh presiden Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok sejak Mao Zedong, terlepas ide yang disampaikan oleh Tiongkok merupakan ide yang baik dilakukan di Tibet. Merujuk pada freetibet.org, masyarakat Tibet tidak ingin identitas mereka dihilangkan oleh pemerintah Tiongkok. Tindakan Tiongkok merupakan tindakan represif yang menyebabkan berbagai isu seperti eksploitasi sumber daya alam, pengusiran, larangan beribadah, dan lain-lain.

Pada tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di era Xi Jinping yang sedang menjabat sebagai presiden Tiongkok sejak 2013. Pemerintah RRT memiliki kebijakan agar masyarakat Tibet dijadikan seperti masyarakat Tiongkok lainnya melalui kebijakan integrasi dengan membangun perekonomian Tibet dan asimilasi budaya. Hal ini disampaikan oleh Xi Jinping bahwa sejak kongres ke-18 Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2012, kebijakan untuk mengatur Tibet telah diperbaharui dan pada tahun 2015, Tibet mengalami perkembangan dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial (Xi, dalam Aimin, 2020). Tujuan Xi Jinping dalam pembangunan ini adalah untuk kedamaian dan stabilitas sosial. Selain itu, Xi Jinping menginginkan Tibet yang modern, bersatu, harmonis, sejahtera, dan mengalami kemajuan budaya.

Kebijakan asimilasi ini mempunyai tujuan untuk menyatukan etnis minoritas seperti Uighur dan Tibet untuk menjadi bagian dari etnis Mayoritas yaitu etnis Han. Kebijakan ini disebut dengan Sinifikasi. Kebijakan ini bersifat represif yaitu melarang aktivitas yang berkaitan dengan budaya setempat seperti ibadah, acara budaya, dan lain-lain. Sinifikasi juga memaksa untuk memakai adat Tiongkok diatas budaya mereka (Stroup, 2019). Pemaksaan ini bersifat represif. Contoh tindakan represif pemerintahan Tiongkok di era Xi Jinping yaitu Tibet mengadakan festival kuda pada Juni 2013 dan acara itu dihadiri oleh patroli yang berasal dari Tiongkok (Hillman dan Turtle, 2016). Hal ini menyebabkan para penonton merasa tidak aman pada saat menghadiri acara.

Penolakan masyarakat Tibet di era Xi Jinping tetap terjadi hingga saat ini dengan beberapa demonstrasi yang terjadi. Contohnya seperti protes pada saat Olimpiade musim dingin 2022. Para aktivis untuk Tibet demonstrasi pada acara pembukaan olimpiade karena Xi Jinping dianggap telah menyakiti kelompok etnis minoritas (aninews.in, 2022). Domínguez & Weiss (2014) menulis bahwa perdana menteri *Central Tibetan Administration* (CTA) Lobsang Sangay mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok terhadap Tibet telah membuat masyarakat Tibet muak dengan Tiongkok karena berbagai hal seperti diskriminasi, marginalisasi ekonomi, kerusakan lingkungan, dan asimilasi budaya. Selain itu, aninews.in (2021) menulis bahwa demonstrasi terjadi di Paris yang terjadi dari masyarakat etnis Tibet, Uyghur, dan Vietnam karena pemerintahan Tiongkok dianggap telah merusak budaya mereka, memaksa masyarakat untuk diam, dan lain-lain yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Terlepas dari hal itu, pemerintahan Tiongkok berusaha untuk membangun wilayah etnis minoritas yang seharusnya menguntungkan wilayah itu secara ekonomi. Namun, penolakan masih terjadi hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan integrasi Tiongkok era Xi Jinping ditolak masyarakat Tibet?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab kebijakan integrasi era Xi Jinping ditolak oleh masyarakat Tibet

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Kebijakan Etnis era Xi Jinping

Kebijakan etnis Xi Jinping dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan etnis di negaranya. Leibold (2015) menulis bahwa kebijakan etnis akan membuat masalah karena ada perbedaan perlakuan atau diskriminatif yang justru akan menghambat integrasi etnis di Tiongkok. Kebijakan ini juga dinilai akan mengurangi nilai-nilai seperti solidaritas, kerja sama, dan kepercayaan terhadap pemerintahan pusat. Kebijakan yang dibangun Xi Jinping berpotensi untuk menimbulkan rasa perbedaan semakin terasa dan integrasi bisa tidak terjadi.

Kebijakan etnis ini mendapatkan perhatian internasional karena menyangkut masalah hak asasi manusia. Transformasi kebijakan etnis untuk menyatukan etnis-etnis di Tiongkok mempunyai berbagai isu salah satunya Amerika Serikat yang menilai bahwa Tiongkok melakukan genosida terhadap etnis Uyghur (Leibold, 2021). Kebijakan yang diambil Tiongkok dinilai destruktif, namun bertujuan untuk menyatukan etnis yang ada di Tiongkok seperti Tibet dan Uyghur. Perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok juga diperhatikan karena menyangkut hak asasi manusia yang juga dibicarakan di organisasi internasional.

Pada tahun 2012, ada pemberontakan dari masyarakat Uyghur di Xinjiang dan Xi Jinping meminta otoritas lokal untuk tidak memberi ampun untuk meredam pemberontakan (Leibold, 2021). Pemerintahan Tiongkok juga melarang beberapa tradisi Uyghur untuk dilakukan seperti larangan untuk berpuasa untuk masyarakat Muslim setempat dan pada saat pemberontakan pada tahun 2009, ada 200 masyarakat Uyghur tewas.

Zhu Weiqun (2012, dalam Leibold, 2013) mengkritik beberapa kebijakan yang diambil oleh Tiongkok dalam masalah etnisitas karena melihat kejadian seperti USSR dan Yugoslavia yang terpecah karena masalah etnisitas. Hal ini dikarenakan Xi Jinping dinilai melakukan integrasi dengan cara pemaksaan daripada kerelaan etnis untuk bergabung ke Tiongkok karena hal ini tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Walaupun ada perbedaan etnis, etnis itu harus bisa selaras dengan kepentingan Tiongkok dengan cara mereka masing-masing. Zhu juga menyarankan agar identifikasi etnis juga dihilangkan dan pelarangan pembuatan area otonomi baru untuk etnis tertentu.

Xi Jinping menerapkan kebijakan untuk membuat administrasi khusus untuk Tibet dan Xinjiang sendiri-sendiri (Leibold, 2013). Namun, ada argumen bahwa kejadian USSR dan Yugoslavia bisa saja terjadi. Kepentingan Tiongkok untuk membangun hubungan dengan negara-negara Eropa terhambat salah satunya disebabkan oleh faktor etnisitas ini dan menjadi kelemahan dalam membuat kerja sama antar negara. Hal ini disebabkan karena masalah etnisitas memengaruhi stabilitas Tiongkok dan mereka harus menyelesaikan masalah internal ini agar mereka tidak mempunyai citra buruk dalam menjalani kerja sama.

Xi Jinping menginginkan ada integrasi etnis-etnis yang ada dapat menyatukan masyarakat Tiongkok menjadi bangsa Tiongkok (Leibold, 2013). Masalahnya adalah banyak etnis yang harus disatukan dan untuk orang Tibet sendiri mempunyai kendala untuk disatukan karena ada etnis Han yang mendominasi. Ditambah dengan kebijakan yang terpisah antar etnis yang membuat integrasi semakin sulit ditambah dengan situasi adanya wilayah otonomi etnis seperti Tibet dan Xinjiang, lalu ada kelas sosial Mayoritas dan minoritas.

Masyarakat etnis Mongolia yang ingin belajar ke Tiongkok mengalami asimilasi budaya melalui kurikulum yang diberikan oleh Tiongkok dan diharuskan belajar bahasa Mandarin selama satu tahun sebelum melanjutkan studinya (Mas, 2021). Studi mengenai sejarah Mongolia

dihapus dari kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah untuk mencegah ada unsur identitas yang dapat membuat pelajar Mongol tetap pada budaya Mongol. Hal ini lantas akan menyebabkan orang Mongolia di Tiongkok perlahan kehilangan identitasnya sebagai orang Mongolia dan menjadi orang Tiongkok. Tiongkok juga melarang siapa pun untuk memakai atau menggunakan atribut atau benda yang berkaitan dengan Mongolia seperti bendera, baju daerah, dan lain-lain. Konsekuensi jika hal ini terjadi adalah mendapat hukuman oleh pihak yang berwajib.

Kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok merupakan tindakan represif agar tidak ada atribut selain Tiongkok di semua aktivitas masyarakat. Mas (2021) menyatakan bahwa para orang Mongolia ini dipaksa untuk tidak menggunakan atribut apa pun dan akan dihukum jika melanggar. Pemerintahan Tiongkok melakukan propaganda melalui pendidikan yang penuh dengan budaya Tiongkok dan pelarangan penggunaan atribut selain dari Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok dengan cara ini sengaja menghapus budaya selain Tiongkok di negaranya dan memaksa orang selain Tiongkok untuk memakai budaya dan identitas Tiongkok. Mas (2021) juga menyatakan bahwa hal ini juga berlaku untuk masyarakat yang berasal dari Xinjiang dan Tibet. Kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok dalam propagandanya adalah pemblokiran konten yang berkaitan dengan Mongolia dan lain-lain sehingga hampir tidak ada konten mengenai hal itu di sosial media Tiongkok.

1.4.2 Represi Otoritas Tiongkok terhadap Masyarakat Tibet

Artikel hrw.org (2016) menjelaskan krisis kemanusiaan yang terjadi di Tibet pada tahun 2013 hingga 2015 yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok. Tiongkok memberlakukan beberapa kebijakan represif terhadap masyarakat etnis Tibet dan hrw.org mendapatkan 479 kasus berkaitan dengan kasus hukuman, persekusi, dan lain-lain selama periode yang telah disebutkan. Tiongkok memberlakukan kebijakan ini membuat perhatian bagi pemerhati hak asasi manusia karena setiap manusia berhak untuk

mendapatkan haknya. Namun, pemerintahan Tiongkok dalam hal ini memberlakukan kriminalisasi terhadap masyarakat Tibet yang memprotes ke pemerintahan Tiongkok tanpa kekerasan. Lalu, Tiongkok memberlakukan pengetatan dalam pengawasan kehidupan sehari-hari Tibet yang membuat masyarakat Tibet tidak nyaman dengan kehadiran Tiongkok dan ada kesan represif.

Hrw.org (2016) kesulitan menggali informasi mengenai isu kemanusiaan Tibet karena pihak Tiongkok membatasi informasi yang diberikan. Tindakan Tiongkok yang represif terhadap Tibet patut diperhatikan dan hal ini dirasakan oleh pencari informasi yang dibatasi oleh pemerintahan Tiongkok. Kasus yang ditemukan merupakan kasus yang ditindak oleh Tiongkok karena mengkritik kebijakan pemerintahan Tiongkok. Alasan Tiongkok untuk merepresi Tibet adalah untuk menjaga stabilitas negara. Namun, banyak otoritas Tiongkok yang berjaga di wilayah Tibet. 479 tahanan yang ditangkap oleh Tiongkok, 153 orang dihukum dan jika dipenjara rata-rata 5-7 tahun.

Orang yang dihukum rata-rata merupakan ketua komunitas, aktivis lingkungan, dan penduduk yang aktif di bidang sosial budaya termasuk penulis dan penyanyi (hrw.org, 2016). Tiongkok memakai beberapa cara untuk propaganda partai komunis Tiongkok untuk menyebarkan ideologi dan merepresi masyarakat Tibet hingga ke akarnya. Cakupan wilayahnya hingga ke pedesaan dengan pengiriman otoritas atau pihak berwajib agar propaganda tetap terlaksana dan memaksa masyarakat Tibet untuk tunduk terhadap pemerintahan Tiongkok agar stabilitas terjaga sesuai dengan keinginan Tiongkok.

Penghukuman masyarakat Tibet yang mengkritik Tiongkok dinilai terlalu represif dan masyarakat Tibet dipaksa untuk tunduk terhadap Tiongkok, walaupun kritikan ini merupakan kritikan kecil. Hrw.org (2016) juga menjelaskan bahwa jika ada kritikan dalam bentuk apa pun di ponsel bisa menyebabkan hukuman penjara untuk siapa pun yang menyimpannya. Hal ini dikarenakan Tiongkok khawatir bahwa Tibet masih ada keinginan

untuk memerdekakan diri terhadap Tiongkok atau menentang kebijakan Tiongkok di Tibet yang kemudian dijadikan sebagai tindakan kriminal. Namun, penghukuman oleh Tiongkok menyebabkan beberapa tahanan meninggal dunia karena kesalahan dari otoritas Tiongkok dan termasuk di antaranya adalah usia anak-anak.

1.4.3 Sinifikasi Etnis di Tiongkok

Sinifikasi merupakan proses asimilasi yang dilakukan Tiongkok agar semua etnis dapat bersatu dengan etnis Han yang merupakan etnis dominan di Tiongkok. Sinifikasi mempunyai aturan yang memaksa untuk mengendepankan budaya Tiongkok diatas budaya etnis itu sendiri (Stroup, 2019). Namun, aturan sinifikasi ini kurang mencerminkan pluralisme karena ada paksaan untuk tidak mengadakan acara-acara budaya setempat. Xi Jinping tidak mempromosikan perbedaan budaya, namun perbedaan budaya yang ada disatukan agar tidak ada perbedaaan budaya. Beberapa represi yang terjadi di Xinjiang untuk etnis Uyghur seperti larangan untuk menggunakan bahasa Arab dan lain-lain.

Salah satu artikel di Colorado.edu (tt) yang berjudul *Economic Development And Cultural Assimilation* menjelaskan bahwa konflik etnis minoritas melawan pemerintahan Tiongkok dan etnis Mayoritas yaitu etnis Han. Namun, Tiongkok menganggap bahwa konflik ini merupakan bentuk pemberontakan dari kelompok etnis tersebut terhadap pemerintahan dan Tiongkok mengambil kebijakan untuk membangun infrastruktur di wilayah etnis itu agar pemberontakan tidak kembali terjadi. Namun, pembangunan infrastruktur yang dinilai akan membuat mereka tidak memberontak dan menjadi bagian dari Tiongkok tidak berhasil dan mereka tetap tidak ingin memenuhi kepentingan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dan infrastruktur tidak cukup untuk menahan pemberontakan etnis dan harus melihat dari sudut pandang lain.

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 Integrasi Sosial

Negara tidak ingin masyarakatnya mengalami perpecahan karena akan menimbulkan konflik dan disintegrasi sosial yang akan merugikan negara. Negara membutuhkan masyarakatnya untuk memenuhi kepentingan negara. Menurut Alcantara (1995), integrasi sosial mempunyai tujuan seperti meningkatkan ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Masyarakat yang terpecah-pecah akan menyulitkan pembuat kebijakan untuk membuat aturan untuk semua masyarakat dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dalam negaranya dan berpotensi untuk memunculkan ketidaksetaraan. Integrasi sosial mempunyai beberapa hambatan karena faktor identitas dan keamanan dari masyarakat itu. Integrasi sosial yang tidak diharapkan masyarakat mempunyai dampak negatif seperti disintegrasi kembali atau marginalisasi kelompok masyarakat dengan nilai-nilai tertentu. Integrasi sosial bukan menyatukan masyarakat begitu saja, namun bagaimana masyarakat bisa memperoleh hak-hak mereka sehingga tidak ada rasa marginalisasi, konflik etnis, dan aktivitas lain yang memicu pecah belah masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah setempat untuk integrasi harus memerhatikan budaya masyarakat setempat dan berdialog agar kepentingan dari beberapa pihak dapat diselesaikan tanpa konflik.

Integrasi sosial digunakan atas dasar interaksi antar manusia yang memengaruhi sistem sosial, norma, ekosistem, dan lain-lain yang nantinya akan berimplikasi terhadap keamanan negara (Kaplan, 2017). Manusia yang kacau karena konflik, pendidikan yang kurang, ekonomi yang tidak berkembang, dan lain-lain akan memengaruhi keamanan negara yang mana merupakan tanggung jawab negara untuk membuat mereka dan masyarakat di dalamnya merasa aman. Integrasi dan disintegrasi sosial dipengaruhi oleh perbedaan yang ada di masyarakat seperti kelas sosial, identitas, latar belakang, suku, budaya, etnis, dan lain-lain. Perbedaan yang terjadi di masyarakat akan membuat masyarakat lain melakukan tindakan yang

berbeda terhadap satu dengan yang lainnya dan akan menimbulkan kesan diskriminatif, sehingga konflik atas dasar diskriminasi kerap terjadi dan hal ini mengganggu stabilitas negara. Setiap manusia terhubung satu sama lain dan terhubung dengan sistem yang lebih besar yang memengaruhi satu sama lain dan merubah perilaku manusia tanpa disadari. Oleh karena itu, integrasi sosial dipakai untuk mengatur masyarakat untuk bisa beradaptasi dan membantu satu sama lain untuk berkembang bersama (Kaplan, 2017). Perbedaan akan terus ada dan harus ada aturan atau sejenisnya untuk membuat masyarakat untuk berkoeksisten dengan masyarakat lainnya.

Konsep Integrasi Sosial ini mempunyai fungsi dalam penelitian ini sebagai penjelasan bagaimana integrasi dan disintegrasi sosial dalam kebijakan yang diterapkan oleh Xi Jinping dan kaitannya dengan konsep ini dan mengapa masyarakat Tibet ingin disintegrasi dengan pemerintahan Tiongkok. Integrasi dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kebijakannya, namun penolakan akan tetap ada untuk kelompok masyarakat tertentu.

1.5.2 Asimilasi Sosial

Asimilasi merupakan suatu proses integrasi sosial dimana suatu kelompok sosial diharuskan untuk mengadopsi nilai budaya lain diluar lingkungan mereka. O'Flannery (1961) menjelaskan bahwa dalam kasus imigran yang datang ke Amerika Serikat, mereka harus belajar sistem sosial yang ada di Amerika Serikat dan mereka harus melepaskan budaya yang dianut sebelum migrasi ke Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa asimilasi mengharuskan untuk suatu individu dan/atau kelompok harus melepaskan budaya lamanya dan beradaptasi dengan budaya baru yang berlaku di lingkungan setempat agar mereka dapat diterima di lingkungan baru dan mungkin berganti identitas. Contohnya seperti keluarga yang berasal dari Itali pindah ke Amerika Serikat dan masih dianggap sebagai orang Itali walaupun sudah lama di Amerika Serikat (O'Flannery, 1961).

O'Flannery (1961) menjelaskan bahwa asimilasi berfungsi untuk menginternalisasi kelompok untuk mengikuti mayoritas dari lingkungan setempat dan menyatu dengan lingkungan setempat agar dipandang setara. Jika mereka tidak berasimilasi, maka akan ada perbedaan struktural di beberapa sektor sosial. Asimilasi tidak menuntut untuk menghapus identitas etnis dari suatu kelompok yang sedang beradaptasi di lingkungan baru, melainkan mereka harus menyerap apa saja yang ada di lingkungan baru sehingga mereka bisa membaur dan diterima dalam lingkungan baru itu. Asimilasi tidak menutup kemungkinan untuk menghilangkan identitas yang sebelumnya terbentuk, namun hal ini jarang terjadi. Proses asimilasi mempunyai beberapa hambatan karena identitas lama dari suatu individu atau kelompok masih melekat dan mereka membentuk komunitas etnis untuk mempertahankan identitas mereka.

Konsep Asimilasi Sosial ini mempunyai fungsi dalam penelitian ini sebagai penjelasan bagaimana asimilasi sosial dalam kebijakan yang diterapkan oleh Xi Jinping dan kaitannya dengan konsep ini dan mengapa masyarakat Tibet ingin disintegrasi dengan pemerintahan Tiongkok. Asimilasi sosial merupakan salah satu bentuk dari integrasi sosial yang berkaitan dengan kebijakan Sinifikasi Tiongkok yang ingin menyatukan budaya Tibet dengan budaya Han.

1.5.3 Penyebab Pergerakan atau Protes Etnis

Protes publik merupakan salah satu gerakan yang dijalankan oleh suatu kelompok etnis karena mereka menolak atau tidak setuju terhadap suatu kebijakan (Yiftachel, 1997). Protes etnis sering terjadi di kalangan etnis minoritas karena keteraturan sosial politik yang berlaku di antara mereka tidak sesuai dengan kepentingan etnis seperti diskriminasi, ethnonasionalisme, dan lain-lain. Merujuk pada pendekatan *ethno-national*, protes oleh etnis minoritas disebabkan oleh keinginan *self-determination*. Pendekatan ini menjelaskan bahwa suatu kelompok etnis mempunyai rasa primordialisme untuk membela etnis mereka. Pendekatan mempunyai fokus

ke nasional, budaya, dan teritori, serta tidak melibatkan unsur sosial-ekonomi. Penyebab protes dari pendekatan ini adalah pada saat etnis mayoritas membangun wilayah tempat etnis itu, etnis tersebut dirugikan karena ada unsur diskriminasi, aturan dari pemerintah yang tidak sesuai, dan eksklusi sosial.

Selain itu, ada pendekatan *ethnic regionalism* yaitu protes yang disebabkan faktor wilayah dari etnis minoritas itu (Yiftachel, 1997). Pendekatan ini menjelaskan bahwa suatu etnis minoritas mempunyai konflik kepentingan dengan negara domisilinya. Protes ini melibatkan kepentingan nasional, teritori, dan isu sosial-ekonomi. Regional juga melibatkan sumber daya alam yang ada di wilayah itu dan kebijakan publik yang memberatkan etnis itu. Protes ini mempunyai beberapa isu di dalamnya seperti budaya, kepercayaan, atau teritori karena mereka mempunyai sistem yang memungkinkan untuk menjalani pemerintahan lokal secara otonomi. Dengan otonomi, mereka dapat membuat sistem seperti edukasi, budaya, hingga pembangunan dalam wilayah mereka karena etnis minoritas mempunyai prioritas dalam mempertahankan budaya mereka dan tidak ingin dikuasai oleh pihak lain diluar etnis itu. Otonomi etnis bisa dimulai dengan otonomi wilayah negara hingga kemerdekaan etnis di wilayah itu.

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab masyarakat etnis Tibet memberontak kepada pemerintahan Tiongkok. Faktor penyebab dari konflik ini dapat disebabkan oleh satu faktor atau beberapa faktor yang telah dijelaskan. Dengan konsep ini akan menjelaskan bagaimana masyarakat Tibet menolak kebijakan integrasi yang diimplementasikan oleh pemerintahan Tiongkok.

1.6 Hipotesis

Kebijakan etnis pemerintahan Tiongkok era Xi Jinping ditolak karena kebijakan integrasi yang diterapkan tidak dapat memenuhi kepentingan Tibet karena implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan

Tiongkok merusak lingkungan masyarakat Tibet yang mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam untuk dikonsumsi dan kehilangan budaya asli masyarakat Tibet. Oleh karena kepentingan ini, masyarakat Tibet memberontak untuk memenuhi kepentingan mereka.

1.7 Metodologi

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1.1 Asimilasi dan Integrasi Budaya

Asimilasi budaya merupakan penggabungan dua budaya yang berbeda, namun asimilasi mempunyai dampak untuk kedua pihak yang melakukannya. Menurut Marrone (2017), asimilasi merupakan proses dan bisa berdampak pada asimilasi untuk satu pihak dan ada yang merasa asimilasi tidak mengorbankan budaya yang sudah ada. Hal ini dikarenakan mereka harus mencampurkan budaya, bahasa, dan lain-lain dan berpotensi menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada. Contohnya seperti bila asimilasi terjadi, bahasa Tibet lama kelamaan punah, budaya Buddhisme yang berkurang, dan lain-lain. Asimilasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pernikahan dengan suku berbeda, imigran, dan lain-lain. Bentuk interaksi dengan suku budaya lain dapat memengaruhi dengan dampak kecil atau pun besar, bahkan menghilangkan budaya asli dari pihak yang mengasimilasi dan diasimilasi. Marrone (2017) juga menjelaskan bahwa banyak budaya tertentu yang diatur, diawasi, bahkan dilarang oleh pemerintahan. Hal ini dikarenakan budaya mempunyai dampak besar untuk kehidupan masyarakat dan menunjukkan bahwa budaya sulit diubah dan/atau dihilangkan dari masyarakat yang menganutnya. Asimilasi akan sulit dilakukan jika masyarakatnya sudah melekat erat dengan budayanya dan tidak ingin mengorbankannya dengan alasan apa pun. Pelarangan budaya tidak akan menghilangkan keinginan orang untuk menggunakan budaya yang sudah dipakai sehari-hari.

Asimilasi dengan paksaan dilakukan oleh negara tertentu terhadap etnis minoritas untuk berasimilasi dengan etnis mayoritas. Wilde (2015) juga menjelaskan bahwa masyarakat yang mempunyai banyak budaya dapat memengaruhi pembentukan identitas negara dan hal ini memaksa etnis minoritas untuk mengorbankan identitas dan budaya mereka. Setiap manusia mempunyai hak untuk berkembang dalam hal apapun karena manusia mempunyai kebebasan bertindak. Wilde (2015) menjelaskan bahwa perbedaan yang berdasarkan pada ketimpangan menyebabkan rasa ketidakadilan yang mendorong pemerintahan untuk mencari cara agar semuanya bisa setara. Ketidaksetaraan juga disebabkan oleh kebebasan bertindak dari setiap manusia dan ketidaksetaraan ini terlihat dari sisi ekonomi yaitu ada yang kaya dan yang miskin. Kebebasan tidak hanya masalah ekonomi, namun juga masalah aturan pemerintahan, politik, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Kebebasan ini direpresi oleh pemerintahan untuk mengendalikan masyarakatnya sehingga kebebasan masyarakat tidak melanggar “batas-batas” yang diatur oleh negaranya. Namun, kenyataannya Tiongkok memilih jalan yang berbeda untuk mengatasi perbedaan yang dialami oleh masyarakatnya sendiri. Asimilasi yang dilakukan Tiongkok memaksa untuk suatu kelompok etnis masyarakat Tibet untuk mengorbankan identitas, budaya, dan lain-lain karena dinilai dengan pengorbanan itu, maka mereka akan mengadopsi budaya etnis Han Tiongkok. Penulis mendefinisikan asimilasi sebagai bagian dari integrasi sosial yang menggabungkan suatu budaya atau etnis ke kelompok budaya lainnya yang dapat menghilangkan budaya suatu etnis yang terlibat.

1.7.1.2 Kepentingan Kelompok Etnis

Kelompok etnis secara politis mempunyai kepentingan seperti identitas, budaya, wilayah, dan lain-lain. Suatu kelompok etnis dalam hidup di suatu negara yang menjadi tempat tinggal etnis itu. Terlepas apa yang dilakukan oleh negara terhadap suatu kelompok etnis, mereka mempunyai kepentingan seperti Nasionalisme etnis. Nasionalisme dapat dianggap sebagai prinsip politis yang menuntut pemerintahan harus sejalan dengan

pembangunan bangsa (Cederman et al., 2010). Rasa Nasionalisme etnis berasal dari keinginan dari etnis itu untuk bersatu untuk tujuan yang sama. Nasionalisme sendiri dapat berasal dari etnis, kelompok, negara, dan sebagainya. Namun, nasionalisme spesifik untuk menjelaskan etnis adalah ethnonasionalisme.

Ethnonasionalisme mempunyai beberapa variabel mengenai kemerdekaan untuk kelompok etnis itu seperti lokasi geografis, bentuk pemerintahan, masyarakat, filosofi kehidupan yang dianut, dan lain-lain (Connor, 1973). Hal ini dikarenakan mereka mempunyai sejarah dari pembentukan etnis dan kelompok etnis itu yang membuat mereka mempunyai kesadaran untuk mempertahankan keunikan dari budayanya. Salah satu cara mereka untuk menjaga keunikannya adalah mengisolasi diri dari dunia luar agar budayanya tidak tercampur dengan budaya lain. Sifat xenofobia dan sejarah pembentukan menjadi faktor mengapa etnis tidak ingin membuka diri ke dunia luar dan mempertahankan budaya etnisnya.

Penulis menyimpulkan bahwa kepentingan kelompok etnis berasal dari nilai ethnonasionalisme yang dianut oleh etnis itu. Dalam ethnonasionalisme mempunyai berbagai nilai yang didalamnya merupakan kepentingan etnis untuk mempertahankan keunikannya. Konsep ini dipakai untuk penelitian ini agar penulis dapat menganalisis kepentingan etnis Tibet yaitu dengan memperjuangkan isu sumber daya alam dengan ethnonasionalisme yang dianut.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi pustaka yang mempunyai kredibilitas. Studi pustaka ini berupa artikel, berita, dan buku yang mendukung penelitian. Menurut Roselle et al. (2011), studi literatur adalah proses meninjau ulang penelitian akademis dalam bidang tertentu. Studi literatur harus menggunakan sumber-sumber yang mempunyai kredibilitas dan harus memerhatikan kemungkinan suatu literatur berpotensi mempunyai ketidakakuratan. Oleh karena itu, sumber

yang digunakan harus merupakan sumber yang bisa digunakan oleh akademisi. Tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil sumber kredibel daring seperti situs berita daring mengenai topik ini.

1.7.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.

Ruang lingkup penelitian mencakup kebijakan etnis oleh pemerintahan Tiongkok sejak era Xi Jinping yaitu sejak tahun 2012 hingga Maret 2022 ketika pemerintahan Tiongkok mengeluarkan kebijakan untuk melarang bahasa Tibet di *platform streaming* Tiongkok

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Mahoney dan Goertz (2006), penelitian kualitatif menganalisis penyebab dari suatu kejadian terjadi dalam penjelasannya. Dalam kasus ini, masyarakat etnis Tibet menolak kebijakan integrasi Tiongkok yang penyebabnya akan diteliti dalam tulisan ini.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 berisi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, teori dan konsep, dan metode penelitian. Bab 2 berisi kebijakan Tiongkok dalam integrasi budaya Tibet. Bab 3 berisi kepentingan masyarakat Tibet terhadap kebijakan Tiongkok. Bab 4 berisi kesimpulan